

DIMENSI PENDIDIKAN, PEMBAURAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Sudiharto DJIWANDONO

PERMASALAHAN

Masalah pembauran atau juga dikenal sebagai asimilasi, yaitu proses penyatuan ataupun pengintegrasian golongan Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan Asing ke dalam kesatuan bangsa Indonesia sehingga menjadi satu kesatuan sosiologis yang harmonis, merupakan suatu masalah yang cukup pelik. Masalahnya memang tidak sederhana, sebaliknya sangat kompleks, bercampur-baur antara faktor-faktor obyektif dan faktor-faktor psikologis-emosional.

Tidak bisa dihindari bahwa pembicaraan mengenai masalah pembauran atau asimilasi hampir selalu diartikan atau diasosiasikan dengan "masalah Cina" di Indonesia dengan segala macam citra negatif dan prasangka di dalamnya. Di masyarakat masih banyak orang yang tidak dapat atau tidak mau membedakan apakah seseorang keturunan asing itu WNI atau WNA, dan sejauh hal itu menyangkut seorang Cina banyak orang tidak mau tahu apakah ia seorang peranakan (babah) atau seorang totok (sinkhe). Kebanyakan orang akan menganggapnya sebagai seorang totok (sinkhe) dengan prasangka-prasangka tertentu yang terkandung dalam anggapan tersebut. Di kalangan masyarakat seperti antara lain di kalangan masyarakat Jawa, sebutan atau istilah sinkhe (orang Jawa menyebutnya "singkek") pada umumnya mempunyai konotasi yang tidak baik. Hari Poerwanto dalam artikelnya yang berjudul "The Problem of Chinese Assimilation and Integration in Indonesia" antara lain mengatakan bahwa di kalangan orang-orang Jawa istilah itu mempunyai konotasi "impoliteness" (sinkhe means an impolite person).¹

Dalam hal ini "sinkhe" yang konon berarti "tamunya baru" telah

1 Hari Poerwanto "The Problem of Chinese Assimilation and Integration in Indonesia", *Philippine Sociological Review*, 24 (1-4), January-October 1974, p. 52

memperoleh nuansa yang mengandung pengertian tidak baik, yang sama sekali lain dari arti yang sebenarnya.

Bahwa asimilasi selalu diartikan atau diasosiasikan dengan masalah Cina kiranya dapat dimengerti mengingat adanya kenyataan bahwa dibandingkan dengan golongan-golongan minoritas lainnya, golongan minoritas dari etnik Cina jumlahnya relatif besar dan mempunyai peranan besar di bidang ekonomi, khususnya di sektor perdagangan. Namun apabila karena kenyataan itu orang lalu meninggalkan akal sehat dan secara terus-menerus mendasarkan sikap dan penilaiannya pada prasangka dan asumsi-asumsi yang stereotif mengenai masalah Cina dan masalah pembauran pada umumnya, tentu hal itu merupakan gejala yang tidak sehat dan masalahnya tidak akan pernah terselesaikan.

Kenyataan di masyarakat adalah sedemikian rupa, antara lain sebagaimana diungkapkan oleh Majalah *Tempo*: "Di Indonesia, bagi kebanyakan orang, kata 'Cina' punya konotasi yang tidak enak. Untuk mengucapkan bahwa 'orang Cina juga manusia' bukan saja akan terdengar klise, tetapipun bertentangan dengan prasangka yang berakar dalam di sini. Untuk mengatakan bahwa 'kita semua sebenarnya Cina' bisa kian berabe - meskipun kita tahu, bahwa kitapun bisa berhitung keburukan dan keunggulan yang terdapat pada diri kita."¹

Ungkapan tersebut, meskipun terasa agak didramatisir, kiranya memang mengandung kebenaran. Adanya prasangka di masyarakat terhadap golongan etnik Cina misalnya merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dan ini jelas merupakan faktor penghambat yang perlu diperhitungkan dalam usaha pembauran.

Secara umum dapat dikatakan bahwa prasangka adalah suatu anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum seseorang mengetahui, menyaksikan ataupun menyelidiki sendiri sesuatu itu. Prasangka telah membuat orang berpikir dan mengambil sikap dalam suatu pola tertentu yang negatif, dan sering kali membuat dirinya tertutup terhadap pandangan lain yang tidak sesuai dengan pola yang dianutnya, tidak peduli apakah pandangan lain itu rasional dan secara obyektif benar.

Ada banyak pendapat maupun teori mengenai prasangka, tetapi dalam rangka kehidupan kemasyarakatan prasangka itu selalu berkenaan dengan penilaian atau sikap dari kelompok yang satu terhadap kelompok lain yang termasuk dalam kategori tertentu, suatu penilaian yang menganggap rendah atau sikap yang tidak bersahabat atas dasar perbedaan suku, ras, agama, tingkatan sosial, maupun ideologi atau jenis kelamin.²

1 Majalah *Tempo*, No. 8 Tahun X, 19 April 1980, Catatan Pinggir

2 Lihat antara lain: Ernst M. Wallner: "Prejudice and Society", *Education*, Vol. II p. 94-95, Institute for Scientific Cooperation, Tubingen, 1975

Apa yang dikemukakan di muka tentang pandangan yang masih terdapat di (sebagian) kalangan masyarakat Jawa terhadap orang-orang Cina sehingga sebutan "sinkhe" mempunyai konotasi yang tidak baik, merupakan satu contoh bagaimana prasangka itu "bekerja" dan mempengaruhi pandangan orang. Di sini juga tampak adanya sikap yang apriori dan pandangan yang bersifat generalisasi yang semuanya itu bersumber dari prasangka. Bahwa semua orang Cina adalah sinkhe, bahwa antara yang WNA dan yang WNI tiada beda dan karena itu mereka pada umumnya tidak baik.

Sebab-musabab dari timbulnya prasangka demikian mungkin dapat ditelusur kembali dari kejadian-kejadian maupun pengalaman-pengalaman sejarah di masa lalu. Sebagai pendatang-pendatang baru dengan latar belakang kebudayaan yang lain, bisa dimengerti apabila mereka menunjukkan tingkah laku dan kebiasaan-kebiasaan yang dalam pandangan masyarakat setempat dianggap kurang baik. Lebih-lebih di masa lalu di mana adat dan tradisionalisme masih sangat kuat pengaruhnya, sesuatu yang baru yang datang dari luar lingkungannya selalu menimbulkan perasaan curiga yang dapat berkembang menjadi antipati bahkan sikap permusuhan.

Keadaan ini lebih dipertajam lagi oleh campur tangan pihak penguasa pada waktu itu sehingga proses penyesuaian (adaptasi) dan pembauran tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya dari pihak pendatang, situasi lingkungan baru yang tampak kurang akomodatif bahkan kadang-kadang memusuhi, mendorong mereka untuk bersikap eksklusif, menyendiri dalam kelompok mereka di tengah-tengah masyarakat pribumi yang mayoritas. Eksklusivisme ini makin terpujuk oleh berbagai macam kebijaksanaan pemerintah kolonial pada waktu itu baik di bidang hukum, pemukiman, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain.

Masalahnya menjadi semakin kompleks sejalan dengan kompleksitas kehidupan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya kita tidak hanya berhadapan dengan masalah perbedaan latar belakang kebudayaan, tetapi di dalamnya telah bercampur-baur dengan permasalahan yang bersifat ekonomi, sosial, dan juga politik. Sementara orang memandang bidang ekonomi dan sosial merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab utama kurang serasinya hubungan antara golongan pribumi dan nonpribumi sehingga proses pembauran tidak berjalan lancar. Pandangan ini lebih melihat peranan golongan nonpribumi yang begitu besar di bidang ekonomi serta perbedaan kekayaan yang menyolok di antara kedua golongan sebagai faktor-faktor dominan yang memisahkan kedua belah pihak.

Tanpa mengingkari bahwa masalah di bidang ekonomi dan perbedaan kaya miskin merupakan faktor-faktor yang penting yang harus diperhitungkan dalam rangka usaha pembauran, menurut hemat penulis faktor utama yang merupakan hambatan terbesar adalah *prasangka* yang dalam sejarah te-

lah tumbuh dan tertanam dalam di masyarakat. Sehingga oleh karenanya yang kiranya paling penting dilakukan ialah mengeliminir kalau tidak menghilangkan prasangka itu dari masyarakat.

PERLU PERUBAHAN SIKAP MENTAL

Masalah pembauran pada hakikatnya adalah masalah hubungan antar manusia, dan ini tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya selama didasarkan atas atau selalu dibayangi oleh prasangka. Sebaliknya hubungan itu akan berjalan wajar manakala prasangka itu melalui suatu proses dapat dihapuskan, sekaligus dibina dan dikembangkan sikap-sikap positif seperti tenggang rasa, saling pengertian dan saling menghargai. Artinya mutlak diperlukannya suatu perubahan sikap mental dari yang negatif ke arah sikap mental yang lebih positif secara individual maupun kelompok, dari kedua belah pihak.

Proses demikian kiranya dapat diharapkan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal atau pendidikan kemasyarakatan, baik di sekolah maupun di luar sekolah khususnya di lingkungan keluarga.

Hubungan antara pendidikan dan masalah pembauran harus dilihat dalam kerangka pemikiran ini. Terutama aspek-aspek kognitif dan afektif dari pendidikan diharapkan akan membawa orang ke arah sikap yang lebih terbuka, berpikir dan bertindak secara lebih rasional dan bertanggung jawab. Dengan demikian melalui proses pendidikan prasangka dapat dieliminir dan berbarengan dengan itu proses pembauran diharapkan dapat berjalan lebih lancar.

''Melalui pendidikan kiranya kita akan dapat secara bertahap mengarahkan emosi dan tindakan-tindakan yang bersifat impulsif ke arah saluran yang sehat, dan apabila orang masih memerlukan kambing hitam untuk menyalurkan perasaan-perasaan agresinya, kita seyogyanya mencari dan memerangi musuh dalam kemiskinan, kelaparan, penyakit dan penderitaan, tidak pada sesama manusia, yang seharusnya kita perlakukan sebagai saudara tanpa memandang asal-usulnya, agama, ras atau kelas. Itulah yang seharusnya, tanpa prasangka, menjadi harapan dalam abad kita sekarang .''¹

Apabila kita tarik ke alam dan suasana Bangsa Indonesia, memperlakukan sesama manusia sebagai saudara sebagaimana dianjurkan oleh Ernst M. Wallner di atas, sangat sesuai dengan asas Peri Kemanusiaan dari Pancasila dasar falsafah negara kita.

Seperti ditegaskan oleh almarhum Prof. Dr. N. Drijarkara, Peri Kemanu-

1 Ernst M. Wallner: *Ibid.*, p. 109

siaan berarti menghormati, menjunjung tinggi sesama manusia, setiap manusia, segala manusia. Dalam hubungan ini antara lain beliau mengemukakan, rumusan negatif dari Peri Kemanusiaan adalah: "Apa yang tidak diinginkan untuk dirimu sendiri, janganlah itu kau lakukan terhadap sesama manusia." Sedangkan rumusan positifnya berbunyi: "Cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri, perlakukanlah kepadanya apa yang kau inginkan untuk diri sendiri." Jika manusia taat pada prinsip ini, maka hidup bersama merupakan *persaudaraan*. Persaudaraan itu harus dijalankan baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang besar dari seluruh bangsa.¹

Sudah barang tentu bahwa pendidikan bukan satu-satunya jalan. Usaha melalui bidang pendidikan harus dibarengi dengan usaha dan kegiatan di bidang-bidang lain yang saling menunjang satu sama lain.

Seperti di muka sudah disinggung tentang kompleksitas permasalahan yang ada dan kita hadapi sekarang yang merupakan warisan sejarah masa lalu. Meskipun kita tentu tidak dapat menyalahkan sejarah, tetapi kenyataan-kenyataan yang ada sekarang di sekitar masalah golongan Cina atau keturunan Cina memang tidak dapat dilepaskan kaitannya dari sejarah masa lalu.

Perbedaan latar belakang kebudayaan antara golongan pribumi dan non-pribumi sejak semula telah menimbulkan semacam garis pemisah di antara keduanya. Ini tidak berarti bahwa dalam perkembangan selanjutnya tidak terjadi perubahan ke arah saling mendekatkan kedua golongan tersebut. Pada sementara orang baik individu maupun kelompok dari kedua golongan terbina hubungan-hubungan yang wajar, bahkan "asimilasi fisik" dalam bentuk perkawinan campuran antara golongan pribumi dan nonpribumi sudah terjadi sejak lama. Timbulnya golongan keturunan tentu sebagai akibat dari perkawinan-perkawinan campuran semacam itu pada masa-masa yang lalu.

Selanjutnya perkawinan antara orang-orang keturunan atau peranakan Cina dengan orang-orang pribumi dan antar keturunan mereka terus-menerus terjadi, sehingga menurut G. William Skinner, sebagai akibat dari perkawinan campuran serta asimilasi yang mendalam, sukarlah untuk memastikan siapa yang tergolong orang Tionghoa berdasarkan kriteria ras belaka. Karena itu menurut Skinner, batasan yang memadai tidaklah berdasarkan pada kriteria ras, hukum ataupun budaya, tetapi pada *identifikasi sosial*. "Di Indonesia seorang keturunan Tionghoa disebut orang Tionghoa, jika ia bertindak sebagai anggota dari dan mengidentifikasikan dirinya dengan masyarakat Tionghoa."²

1 Lihat: Prof. Dr. N. Drijarkara, "Pancasila dan Religi", Prasaran pada Seminar Pancasila, Yogyakarta, 17 Pebruari 1959

2 Mely G. Tan (Ed.): *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*, Leknas-LIPI dan Yayasan Obor Indonesia, PT Gramedia Jakarta, 1979, hal. IX

Dengan demikian kita melihat adanya dua pokok masalah yang perlu ditangani secara sungguh-sungguh dalam rangka usaha pembauran, ialah adanya prasangka di satu pihak dan masalah identifikasi sosial di pihak lain. Keduanya menyangkut sikap dan nilai dari kedua belah pihak.

Sejarah masa lalu memang menampilkan berbagai macam pengaruh pada sikap dan pandangan orang dari masa ke masa. Dan keadaan demikian tampaknya cenderung untuk bertahan terus manakala tidak terjadi sesuatu yang mendorong ke arah perubahan.

Sikap dan nilai seseorang tentu banyak dipengaruhi bahkan sebagian dibentuk oleh lingkungannya. Dalam hal ini sikap dan pandangan dalam masyarakat yang kurang baik dalam hubungan dengan masalah pribumi dan nonpribumi yang lebih bersifat memisah daripada mempersatukan sebagian juga timbul karena suasana lingkungan, baik pada masa lalu, sekarang dan yang akan datang.

Kebijaksanaan politik penguasa kolonial pada masa lalu mengenai orang-orang Tionghoa di Indonesia telah menciptakan suasana lingkungan kehidupan yang memisahkan mereka dari golongan pribumi, yang pada dasarnya secara potensial telah mengandung faktor disintegratif di dalamnya. Kebijakan-sanksi-kebijaksanaan tersebut berupa pengaturan-pengaturan dan perlakuan-perlakuan yang khusus ditujukan atau diberlakukan terhadap golongan Tionghoa dalam beberapa bidang kehidupan.

Di bidang hukum misalnya, terdapat tiga ketentuan hukum yang berlaku, masing-masing bagi golongan Eropa, golongan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) yaitu golongan penduduk nonpribumi bukan Eropa yang kebanyakan terdiri dari orang-orang Cina dan Arab, dan golongan pribumi (*Inlanders* atau *Inheemse*). Dari segi kelembagaan pengadilan diadakan perbedaan, yaitu lembaga pengadilan "Raad van Justitie" untuk golongan Eropa dan golongan Timur Asing, khusus dalam perkara-perkara perdata dan dagang, yang kedua adalah lembaga pengadilan yang disebut "Landraad" yang khusus diperuntukkan bagi golongan pribumi dan golongan Timur Asing, khusus dalam perkara-perkara yang bersifat kriminal.

Di lapangan pendidikan, golongan Tionghoa sejak lama memiliki sendiri lembaga-lembaga pendidikan yang bercorak khas Tionghoa, antara lain THHK (Tiong Hoa Hwee Koan) yang memakai bahasa Cina sebagai bahasa pengantarnya. Kemudian sejak permulaan abad ke-20 didirikan pula sekolah-sekolah yang berbahasa pengantar bahasa Belanda khusus bagi golongan Tionghoa, yaitu yang dikenal sebagai HCS (*Hollands Chinese School*) dan MCS (*Middelbare Chinese School*).

Kecuali bidang hukum dan bidang pendidikan di atas, terdapat pula bidang-bidang lain yang diatur secara khusus bagi penduduk golongan Tionghoa yang pengaruhnya masih cukup terasa sampai dewasa ini.

Antara lain ketentuan tentang daerah pemukiman khusus bagi penduduk golongan Tionghoa telah mewariskan keadaan yang masih dapat disaksikan sampai hari ini. Di hampir setiap kota masih dapat dijumpai satu wilayah yang dikenal sebagai daerah "pecinan" yang mengingatkan kita bahwa di masa lalu daerah itu merupakan daerah pemukiman khusus orang-orang Cina dengan segala bentuk kebudayaan maupun gaya dan cara hidup yang khas. Para pemuka masyarakat di kalangan mereka mendapatkan kepangkatan seperti dikenal di kalangan militer seperti letnan, kapten dan mayor sehingga kita mengenal istilah-istilah *Luitenant der Chinesen*, *Kapitein der Chinesen* dan *Majoor der Chinesen*.

Seperti di muka sudah disinggung, sementara orang berpendapat bahwa peranan yang besar dari golongan Tionghoa di bidang ekonomi serta perbedaan kekayaan yang menyolok antara golongan pribumi dan nonpribumi merupakan faktor yang dominan yang memisahkan kedua belah pihak. Apabila kita meninjau kembali ke belakang, tampak bahwa kebijaksanaan pemerintah kolonial pada masa lalu memang seolah-olah "menggiring" golongan Tionghoa untuk menempati posisi sebagai orang-orang perantara, tentu berdasarkan perhitungan kepentingan pihak penguasa. Fungsi perantara ini tidak saja di bidang kegiatan ekonomi (perdagangan) tetapi juga dalam memungut cukai dari rakyat. Di lain pihak orang-orang Tionghoa tidak diperkenankan bekerja di lingkungan pemerintahan sebagai pegawai negeri.¹

Kebijaksanaan tersebut menimbulkan pengaruh yang cukup mendalam di dalam masyarakat. Penggunaan tenaga orang-orang Cina sebagai pemungut (atau "pemborong") pajak dari rakyat sering kali menimbulkan praktek-praktek yang di mata rakyat dirasakan sebagai tindakan kasar, keras dan menekan, yang tentu menimbulkan rasa benci dan sikap permusuhan terhadap orang-orang Cina pada umumnya. Sedangkan larangan orang-orang Cina untuk bekerja sebagai pegawai negeri mendorong mereka untuk bekerja di luar sektor pemerintahan. Kebanyakan mereka terjun ke dunia perdagangan atau bekerja sebagai pegawai partikelir pada perusahaan-perusahaan milik orang-orang Belanda dan Eropa lainnya atau orang-orang Tionghoa, terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam kegiatan ekonomi khususnya sektor perdagangan.

Tidak mengherankan apabila makin lama mereka makin trampil di bidang perdagangan, makin ulet dan makin kuat, karena praktis hampir tidak ada pilihan lain. Di situlah tempat mereka mengadu nasib, dan di situlah mereka harus berjuang dan berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Perdagangan seolah-olah sudah menjadi "way of life" mereka yang secara turun-temurun diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Umumnya mereka cukup

1 Bahan-bahan antara lain dari: Hari Poerwanto, *op. cit.*, hal. 53

berhasil sehingga di mata pengusaha pribumi tampak sebagai suatu ancaman, di samping makin lebarnya perbedaan kekayaan di antara kedua golongan.

Ada kemungkinan bahwa pengaturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan khusus seperti dikemukakan di muka dilakukan justru karena pemerintah kolonial pada masa lalu sejak semula telah menyadari adanya prasangka di kalangan masyarakat terhadap orang-orang Cina. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak penguasa demi kepentingannya. Dengan menempatkan mereka dalam posisi sebagai orang-orang perantara atau golongan menengah dalam strata sosial di Indonesia waktu itu pihak penguasa dapat memetik banyak keuntungan. Dalam hal pemungutan cukai dari rakyat misalnya, pihak penguasa dapat "memborongkan" cukai yang harus masuk ke kas pemerintah kepada beberapa orang Cina yang bermodal dan dapat dipercaya. Yang terakhir inilah yang akan langsung berhadapan dengan rakyat untuk menagih atau memungut cukai yang harus dibayar. Dapat dimengerti apabila dalam pelaksanaannya sering kali timbul eksekse-eksekse, sesuatu yang jelas lebih menambah dan memperdalam prasangka di kalangan orang-orang pribumi terhadap orang-orang Cina. Sementara itu pihak penguasa yang "lebih beruntung", cukai masuk tanpa resiko terkena luapan emosi rakyat karena perasaan dendam dan benci lebih terarah kepada orang-orang Cina yang secara langsung berhadapan dengan mereka.

Oleh karena itu tidak mengherankan apabila seorang sejarawan Inggris seperti dikutip oleh Majalah Tempo, pernah menulis "bahwa orang bumi putera pada umumnya tak membenci orang Belanda benar". Selanjutnya Tempo menulis: Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa nasionalisme kita tidak "rasialis". Tetapi soalnya lain dalam hal menghadapi orang Cinadan seterusnya.¹

Apa yang dapat ditarik sebagai suatu pelajaran dari pengalaman-pengalaman di masa lalu itu ialah antara lain bahwa kebijaksanaan yang tidak tepat dapat mengakibatkan permasalahan menjadi seperti melingkar, semakin kompleks dan semakin sulit pemecahannya. Sekalipun itikad yang melandasi sesuatu kebijaksanaan itu baik, kemungkinan terjadinya salah tindak yang berakibat sebaliknya dari yang diharapkan tetap ada. Apalagi dalam kasus-kasus seperti diuraikan di muka yang motivasinya jelas berdasarkan kepentingan penguasa kolonial pada waktu itu.

Dari uraian sejauh ini kiranya jelas bahwa *perubahan sikap mental* adalah sangat perlu. Sikap mental yang bersumber pada prasangka, pemikiran atau anggapan yang tidak rasional yang telah menimbulkan asumsi-asumsi yang kurang tepat, identifikasi sosial yang salah arah, semuanya itu memerlukan pengarah baru, terutama melalui pendidikan dalam arti luas.

1 Majalah Tempo, No. 8 Tahun X, April 1980, Catatan Pinggir

PEMBAURAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BANGSA

Pada hakikatnya dalam rangka pembangunan nasional pembauran mempunyai peranan yang cukup penting. Dapat dikatakan bahwa berhasilnya usaha pembauran akan memberikan pengaruh yang cukup penting bagi tercapainya pembangunan nasional jangka panjang.

Sebagaimana diketahui, titik sentral dari pembangunan nasional yang kita laksanakan melalui serangkaian Repelita pada hakikatnya adalah manusia, dalam hal ini manusia Indonesia.

Ini berarti bahwa dalam rangka pembangunan nasional unsur manusia dipandang dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga ia tidak hanya diperlakukan sebagai obyek atau sebagai salah satu faktor produksi, tetapi baik dalam kapasitasnya sebagai produsen maupun sebagai konsumen, merupakan tujuan akhir dari semua kegiatan ekonomi.

Hal ini sesuai dengan gejala umum pada jaman kita sekarang ialah bahwa pembangunan yang bertema sentral ekonomi (econo-centrism) pada prinsipnya telah ditinggalkan karena orang menyadari bahwa ukuran-ukuran ekonomi saja tidak dapat dijadikan ukuran yang memadai bagi kesejahteraan manusia dan kualitas hidup (human well-being and quality of life). Apa yang hendak dicapai dari suatu usaha pembangunan dalam jangka panjangnya dengan demikian tidak hanya tujuan-tujuan yang bersifat ekonomi semata-mata, tetapi hal-hal yang berkenaan dengan kesejahteraan dan peningkatan mutu hidup manusia atau apa yang disebut sebagai tujuan sosial budaya.

Dari "econo-centrism" ke "homo-centrism", di mana faktor-faktor sosial budaya yang menentukan sekaligus sebagai hasil akhir dari usaha pembangunan.¹

Kita melaksanakan pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah maupun kepuasan batiniah saja, tetapi keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya. Selanjutnya pembangunan itu harus merata di seluruh Tanah Air, bukan hanya untuk sesuatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat. Hasil-hasil pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup, yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan kita.

Pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh Masyarakat Indonesia. Pembangunan bidang ekonomi yang dalam arah pembangunan jangka panjang menjadi titik berat dari usaha pembangunan haruslah dipan-

1 Lihat antara lain: Janusz Ziolkowski: "Cultural Dimension of Development", dalam *Cultures*, Vol. VI No. 1, UNESCO, 1979, p. 17-18

dang sebagai cara atau sarana yang perlu dan harus ditempuh demi terciptanya landasan yang kuat bagi Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju tercapainya tujuan utama pembangunan sebagaimana telah dikemukakan. Suatu keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kebahagiaan di akhirat, pendeknya suatu kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras.¹

Masalah pembauran kiranya perlu dilihat dari prinsip keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam rangka usaha pembangunan nasional kita.

Keadaan yang serba selaras itu hanya akan tercipta apabila rangkaian usaha pembangunan nasional yang dilakukan itu tidak saja berhasil meningkatkan kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia secara ekonomis, tetapi sekaligus juga berhasil meniadakan hal-hal dan keadaan-keadaan yang merupakan faktor penghambat terciptanya keselarasan dan keseimbangan itu. Dengan perkataan lain keberhasilan pembangunan ekonomi saja tidak dengan sendirinya menjamin terciptanya kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras sebagaimana dicita-citakan.

Keselarasan dan keserasian kehidupan manusia dan masyarakat sebagai mana digambarkan dalam GBHN atau dengan perkataan lain suatu kehidupan yang sejahtera material dan spiritual berarti juga bahwa kualitas hidup manusia telah berhasil ditingkatkan ke suatu tingkat yang tinggi. Tetapi adalah tidak mudah untuk menentukan ataupun mengukur keadaan itu.

Apa yang disebut "kualitas hidup" itu sendiri memang merupakan suatu istilah atau pengertian yang masih memerlukan pembatasan secara lebih jelas. Kualitas selalu berkenaan dengan masalah penaksiran, persepsi dan penilaian. Salah satu pendapat mengatakan bahwa kualitas hidup pada hakikatnya merupakan masalah politik, atau mungkin juga etis.²

Dalam hubungan ini apabila ia diartikan sebagai kehidupan yang serba selaras dan serasi, jelas tidak semata-mata ditentukan oleh kesejahteraan ekonomi (material) saja. Dalam kehidupan individual betapa pun seseorang telah berhasil mencapai kesejahteraan material belum berarti bahwa ia juga sudah mencapai peningkatan kualitas hidupnya dalam pengertian sejahtera dalam suatu suasana kehidupan yang selaras dan seimbang. Keselarasan dan keseimbangan lebih terletak pada suasana mental-spiritual, suatu suasana di mana orang merasa terbebas dari tekanan-tekanan kehidupan masyarakat di

1 Disarikan dari GBHN

2 Peter Atteslander: "Reflection on the 'Quality of Life' as a Function of Social Structures and Social Change - Sociological Perceptions", dalam *Universitas*, Vol. 22 No. 1, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft M.B.H., Stuttgart, 1980, p. 63

mana ia hidup. Bebas dari ketegangan dan konflik serta memiliki kepercayaan dan rasa aman menghadapi hari esok.

Secara nasional disadari bahwa keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi an sich dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh negatif dalam masyarakat berupa ketegangan-ketegangan dan konflik sosial, misalnya apabila keberhasilan itu hanya dinikmati oleh segolongan anggota masyarakat. Dari segi ini maka usaha pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta cara-cara yang "bersih" dalam penanganan program-program pembangunan merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Aspek keadilan dari suatu usaha pembangunan harus sungguh-sungguh mendapatkan perhatian.

Pengaruh positif dari keberhasilan pembauran dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilihat dalam hubungannya dengan terciptanya kondisi masyarakat yang relatif bebas dari ketegangan maupun konflik sosial yang mengganggu keselarasan dan keserasian hidup. Memang ini bukan satu-satunya sumber ketegangan, tetapi sekurang-kurangnya merupakan salah satu sumber yang harus diatasi apabila tujuan pembangunan jangka panjang yaitu kehidupan yang serba selaras dan serba seimbang itu benar-benar hendak diwujudkan.

Dengan demikian tampak adanya tiga hal yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara tepat dalam usaha pembangunan bangsa, *pertama*, masalah pembangunan ekonomi, *kedua*, masalah usaha menghilangkan sumber-sumber ketegangan sosial, dan *ketiga*, usaha menanamkan kepercayaan dan rasa aman masyarakat terhadap masa depan.

Dari ketiga masalah tersebut pembangunan ekonomi tampak menonjol karena pengaruhnya yang besar terhadap masalah kedua dan ketiga. Oleh karena itu adalah pada tempatnya bahwa titik berat usaha pembangunan diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi sebagai cara dan sarana yang perlu dan harus ditempuh demi tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Yang penting kiranya ialah menjaga agar jalannya pembangunan ekonomi tersebut tetap pada rel yang sudah ditetapkan sehingga tidak sampai berkembang ke arah yang menyimpang. Program pembangunan ekonomi harus dijaga untuk selalu sinkron dengan tujuan utama pembangunan nasional seperti telah dikemukakan di muka. Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan ekonomi perlu dijaga tidak justru menimbulkan ketegangan-ketegangan baru dalam masyarakat, sebaliknya harus secara nyata memberikan dampak positif dalam arti makin mengurangi ketegangan. Asas pemerataan yang telah diprogramkan dalam Repelita III ini melalui delapan jalur pemerataan perlu benar-benar dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat diharapkan akan memberikan hasil-hasil nyata dalam masa-masa mendatang. Dengan perkataan lain pembangunan ekonomi harus makin menonjolkan aspek-aspek sosialnya.

Masalah ketiga juga banyak ditentukan oleh keberhasilan usaha pembangunan ekonomi dan suasana lingkungan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Bahwa memang terdapat kemajuan secara mantap, bahwa kestabilan sosial dan politik memang terjamin secara wajar, artinya suatu kestabilan yang sungguh-sungguh timbul dan terbina karena kondisi obyektif dalam masyarakat dan bukan suatu kestabilan semu.

Jelas bahwa semuanya itu merupakan tantangan yang harus kita hadapi dalam pembangunan bangsa ini.

PENDIDIKAN DALAM PROSES INTEGRASI NASIONAL

Masyarakat kita adalah masyarakat yang beraneka ragam atau yang oleh sementara ahli disebut sebagai masyarakat pluralistik. Ia terdiri dari banyak suku bangsa dengan bermacam ragam adat dan kebudayaannya, namun semuanya itu berada dalam satu kesatuan Bangsa Indonesia. Ditinjau dari segi asal keturunan, kita mengenal adanya golongan masyarakat yang disebut "asli" atau pribumi, dan golongan keturunan asing atau nonpribumi, di mana golongan keturunan Cina merupakan golongan yang dominan, baik dari segi jumlah maupun dari segi peranannya di bidang ekonomi.

Keanekaragaman ini terdapat pula dalam kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun mayoritas penduduk beragama Islam, agama-agama lain juga cukup berkembang dan cukup banyak penganutnya, di samping aliran-aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pula sebagai suatu negara yang demokratis, di masyarakat kita terdapat pula aliran-aliran ideologi politik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Semuanya itu memberi warna dan corak tersendiri dari masyarakat Bangsa Indonesia yang beraneka ragam tetapi satu jua adanya.

Sepantasnya kita bersyukur atas kenyataan-kenyataan ini, karena kenyataan tersebut ditunjang oleh potensi kekayaan alam Tanah Air kita merupakan faktor penting yang telah membuat kita sebagai bangsa yang besar.

Tetapi di samping itu selayaknya kita menyadari pula bahwa keanekaragaman itu secara potensial mengandung pula unsur disintegratif yang dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial bahkan memecah dan menceraiberaikan masyarakat. Kenyataan itulah yang pada masa lalu telah dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial dengan politik "divide et impera" yang terkenal itu.

Sementara orang menyebut faktor-faktor disintegratif tersebut dengan istilah "SARA", singkatan dari Suku, Agama, Ras dan Antar golongan/kekuat-

an sosial, yaitu faktor-faktor yang dengan mudah dapat menimbulkan ketegangan dan kerusuhan sosial karena kepekaan orang pada umumnya terhadap hal-hal yang bersangkutan dengan masalah-masalah tersebut.

Memang kita beruntung bahwa berkat usaha dan perjuangan sejak bangsa Indonesia masih di bawah penjajahan asing, kita telah memiliki landasan ideal dan sarana-sarana pokok yang diperlukan bagi pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa. Kita telah memiliki Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, kita telah memiliki asas Wawasan Nusantara, demikian pula kita telah memiliki bahasa nasional.

Salah satu aspek dari Pancasila ialah bahwa, Pancasila sebagai dasar negara RI adalah suatu konsensus yang harus dipegang dengan teguh untuk mencegah terjadinya perpecahan, ketegangan dan konflik sosial, dan untuk memelihara persatuan dan perdamaian antar golongan.¹

Sedangkan Wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik, satu Kesatuan Sosial dan Budaya, satu Kesatuan Ekonomi, dan satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan. Beberapa hal dalam konsepsi Wawasan Nusantara dapat dikutip, antara lain:

- Bahwa Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu Kesatuan Bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya;
- Bahwa secara psikologis, Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, se-Bangsa dan se-Tanah Air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita Bangsa.

Selanjutnya juga:

- Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan Bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan Bangsa;
- Bahwa Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu; sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan Budaya Bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan Budaya Bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh Bangsa.²

Mengenai masalah aneka warna suku bangsa, seperti dikemukakan oleh Prof. Koentjaraningrat, negara kita ada dalam keadaan satu tingkat lebih maju daripada negara-negara lain yang juga berpenduduk suku bangsa pluralistis

1 Kirdi Dipoyudo: "Pancasila, Arti dan Penerapannya", *Analisa*, Tahun VII, No. 3, Maret 1978, hal. 181

2 Dikutip dari GBHN 1978

seperti India, Birma, Pilipina, bahkan Sri Langka. Ini disebabkan karena kita sudah memiliki bahasa nasional, sehingga kita tinggal mengembangkan suatu kebudayaan nasional, yang sebaliknya prosesnya dapat sangat dibantu oleh keadaan telah adanya suatu bahasa nasional itu.¹

Namun demikian adalah suatu kenyataan bahwa kita masih menghadapi masalah dalam proses integrasi nasional, sekurang-kurangnya dalam pengertian perlunya peningkatan usaha ke arah makin mantapnya proses integrasi nasional tersebut. Usaha-usaha demikian harus dilakukan secara sadar dan terus-menerus mengingat bahwa proses integrasi nasional memang suatu proses yang makan waktu. Dalam hal ini kita tidak hanya berhadapan dengan masalah-masalah yang rasional tetapi banyak juga berkaitan dengan hal-hal yang lebih bersifat psikologis dan emosional.

Kiranya adalah sangat perlu setiap orang secara akal sehat menyadari pentingnya integrasi nasional dan secara emosional merasakan bahwa dalam situasi kehidupan masyarakat yang stabil, yang tidak dirongrong oleh ketegangan, konflik dan perpecahan, masing-masing akan lebih mampu mengembangkan dan meningkatkan mutu hidupnya.

Seperti di muka sudah disinggung, salah satu faktor disintegratif dalam kehidupan masyarakat adalah *ras*. Sebenarnya apa yang disebut masalah pribumi dan nonpribumi tidak perlu ada seandainya orang dapat membebaskan diri dari "sentimen ras" dan satu sama lain dapat saling menerima sebagai sesama.

Tetapi kenyataannya tidaklah selalu demikian. Sejarah kita sejak masih dalam masa penjajahan sampai dewasa ini mencatat beberapa kali peristiwa-peristiwa ketegangan, konflik, bahkan kadang-kadang kekerasan dan kerusuhan sosial, yang apabila diteliti bersumber dari ketidakserasian hubungan antara golongan pribumi dan golongan nonpribumi, khususnya golongan keturunan Cina.

Dari uraian-uraian di muka dapat ditarik kesimpulan adanya dua faktor yang paling menonjol yang dapat dianggap sebagai sumber ketidakserasian hubungan antara kedua golongan, yaitu *prasangka* di satu pihak (Ernst M. Wallner) dan *identifikasi sosial* di pihak lain (G. William Skinner).

Sejalan dengan pikiran ini maka usaha mengatasi masalah pembauran ke arah persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka pembangunan nasional yang bertitik sentral manusia yang sedang kita laksanakan ini haruslah diarahkan pada menghilangkan prasangka dalam masyarakat dan mengarahkan identifikasi sosial secara positif.

Kedua-duanya bersumber dari suatu pandangan atau anggapan yang lebih

1 *Prisma*, No. 8 Tahun V, Agustus 1976, hal. 45

bersifat emosional daripada rasional. Anggapan ini harus diubah, di-"rasionalisasi", antara lain kiranya perlu mendapatkan perhatian, seperti telah disinggung di muka, melalui *pendidikan*.

Pendidikan pada umumnya mencakup segala usaha dan kegiatan untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan dan ketrampilan guna memungkinkan seseorang melakukan fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama dengan sebaik-baiknya.¹

Orang tidak dapat hidup sendirian. Sebaliknya setiap orang hanya dapat hidup sebagai manusia dan mengembangkan dirinya dalam dan bersama dengan sesamanya atau dalam interaksi dengan manusia-manusia lainnya. Dalam hubungan ini maka pendidikan berfungsi membantu orang untuk dapat melakukan fungsi hidupnya dalam kebersamaan dengan sesamanya tersebut, karena interaksi dengan manusia lainnya tidak hanya didasarkan pada naluri, tetapi pada daya pikir ataupun akal sehat (*mind*) dan nilai-nilai tertentu, yang kesemuanya itu terbina dan dikembangkan oleh pendidikan.

Setiap orang membutuhkan hubungan dengan orang lain, butuh mengerti dan dimengerti, memperhatikan dan diperhatikan, pendeknya suatu hubungan timbal-balik yang serasi yang akan membuat dirinya merasakan kepuasan dan rasa bahagia. Dengan cara demikian ia membebaskan dirinya dari rasa kesepian yang menyiksa. Proses ini terjadi karena dalam diri manusia terdapat nilai yang disebut "nilai solidaritas" (*value of solidarity*), salah satu dari nilai-nilai yang ada dalam pergaulan bersama antar manusia (*social values*).

Dalam pada itu, di dalam pergaulan dengan sesamanya manusia sekaligus berusaha untuk mengembangkan dirinya sedemikian rupa sehingga timbul dalam dirinya rasa harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri. Inilah apa yang disebut "nilai kekuasaan" (*value of power*), sebagai dimensi lain dalam hidup kemasyarakatan.²

Di muka sudah dikemukakan, bahwa masalah pembauran pada hakikatnya adalah masalah hubungan antar manusia. Sudah sewajarnya apabila dalam membina dan mengembangkan proses pembauran ini nilai-nilai sosial itu diperkembangkan sehingga setiap orang menjadi lebih peka terhadap nilai-nilai yang harus ada di dalam setiap hubungan antar manusia.

Pengembangan daya intelektual akan membuat orang lebih mudah mengerti akan sesuatu secara rasional, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan akan lebih memungkinkan seseorang untuk mengembangkan dirinya da-

1 Bandingkan dengan: Prof. Soegarda Poerbakawatja: *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*, Gunung Agung, Jakarta, 1970, hal. 11

2 Lihat antara lain: S. Takdir Alisjahbana, *Values as Integrating Forces in Personality, Society and Culture*, University of Malaya, Kuala Lumpur, 1966, hal. 73-74

lam hidup kemasyarakatannya, dan pengembangan nilai-nilai akan membuat orang lebih bersikap positif terhadap orang-orang lain di sekitarnya dalam kehidupan kemasyarakatan, sikap toleran, saling mengerti dan selalu memperlakukan orang lain sebagai sesama. Yang terakhir ini lebih-lebih harus selalu tercermin dalam setiap sikap, langkah dan perbuatan setiap orang yang mengaku dan merasa dirinya sebagai orang atau warga negara Indonesia, sebagai konsekuensi dari sila kedua dari Pancasila. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab menunjuk pada sikap yang selalu memperlakukan orang lain sebagai sesama, sebagai manusia seutuhnya dengan segala hak dan martabatnya.

Semuanya itu merupakan "target" pendidikan dalam rangka proses integrasi nasional, khususnya dalam hubungannya dengan masalah pembauran yang menjadi fokus dalam tulisan ini. Selanjutnya pendidikan itu dalam tulisan ini diartikan secara luas, meliputi tidak saja pendidikan formal, yaitu pendidikan yang dilakukan di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya, tetapi juga pendidikan dalam lingkungan keluarga dan dalam masyarakat, yang terakhir ini khususnya pendidikan dalam arti pengembangan nilai-nilai sosial sebagaimana sudah dikemukakan di muka.

Dan dalam rangka pemikiran untuk lebih memperlancar proses pembauran, secara eksplisit ingin diketengahkan bahwa usaha dan kegiatan pendidikan dalam arti luas tersebut diarahkan kepada dihilangkannya prasangka sebagai faktor penghambat keserasian hubungan seperti di muka telah diuraikan. Sedangkan pengarahannya identifikasi sosial secara positif dimaksudkan agar mereka yang termasuk dalam golongan nonpribumi benar-benar mengidentifikasi dirinya sebagai orang Indonesia. Identifikasi diri ini terutama harus tampak dalam sikap, tindakan dan perbuatan nyata dalam pergaulan hidup sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun di lingkungan pergaulan hidup kemasyarakatan yang lebih luas.

Apa yang ingin kita wujudkan melalui proses pembauran kiranya bukan sekedar suatu "koeksistensi damai" antara golongan pribumi dan nonpribumi, tetapi lebih daripada itu, benar-benar suatu integrasi dalam satu kesatuan bangsa, Bangsa Indonesia.

Satu hal perlu dicatat bahwa salah satu unsur dalam pendidikan yang akan sangat menentukan keberhasilannya adalah faktor "pendidik". Di lingkungan pendidikan di sekolah, guru memegang peranan penting dalam menciptakan situasi edukasi yang sehat, di lingkungan keluarga adalah para orang tua dan orang-orang lain yang di dalam sistem kekerabatan yang berlaku merupakan orang-orang yang berpengaruh, sedangkan di lingkungan masyarakat dan pemerintah, para pemuka masyarakat dan para pejabat dari semua tingkat berfungsi sebagai "pendidik". Dari merekalah pada tempat pertama, diharapkan peranan yang positif, terutama melalui pemberian contoh dan suri

tauladan secara nyata serta kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tepat dan bernilai edukatif.

Keberhasilan kita dalam proses pembauran dalam rangka integrasi nasional mempunyai arti besar dalam mencapai tujuan utama pembangunan nasional, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Pembangunan bidang ekonomi adalah sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum. Tetapi ini harus dibarengi dengan usaha penciptaan kondisi sosial yang sehat, yang memungkinkan setiap orang menikmati kehidupan individual dan sosial yang selaras dan seimbang. Dalam arti demikian usaha pembangunan nasional kita berhasil meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia Indonesia.

BEBERAPA CATATAN PENUTUP

Pendidikan dalam proses integrasi nasional merupakan masalah yang umum dihadapi oleh "negara-negara baru" sesudah Perang Dunia kedua, di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Masalah pokoknya ialah bagaimana melaksanakan "nation building" setelah kemerdekaan politik diperoleh, membangun bangsa dan masyarakat dari tata kehidupan yang tradisional ke arah tata kehidupan masyarakat yang modern, yang lebih rasional. Bagaimana mempersatukan suku-suku bangsa dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang pada umumnya tradisional itu ke dalam satu kesatuan bangsa dalam suatu negara bangsa yang modern, yang memiliki satu cita-cita dan tujuan nasional serta memiliki kesadaran akan tanggung jawab bersama terhadap cita-cita dan tujuan nasional itu, adalah suatu masalah besar yang dihadapi dan harus dipecahkan. Hal ini berkenaan dengan proses politik yang ditempuh serta sistem pendidikan nasional yang dipilih oleh masing-masing bangsa atau negara, sesuai dengan ideologi dan pandangan hidup masing-masing.

Seperti telah disinggung di muka, kita beruntung telah memiliki landasan dan sarana yang diperlukan dalam proses integrasi nasional. Bahkan dasar-dasar ke arah "nation building" telah lama diletakkan, jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, antara lain dengan dicetuskannya Sum-pah Pemuda 28 Oktober 1928.

Namun demikian dalam implementasinya tampak masih adanya beberapa kelemahan yang perlu mendapatkan perhatian.

Dalam proses kehidupan politik sering kali dijumpai praktek-praktek yang justru bertentangan dengan ide persatuan dan kesatuan bangsa karena kepentingan politik golongan sering kali ditempatkan secara tidak proporsional, yaitu di atas kepentingan bangsa. Demi kepentingan politik golongan kadang-

kadang faktor-faktor disintegratif seperti telah disinggung di muka "dieks-ploitasi" sedemikian rupa, sehingga apa yang terjadi bukannya makin kukuhnya persatuan, tetapi sebaliknya.

Sudah barang tentu bahwa hal semacam itu harus dicegah. Proses kehidupan politik harus sejajar dengan dan menunjang proses "nation building". Kehidupan politik seharusnya juga selalu bernapaskan pendidikan. Ia harus makin mendewasakan bangsa, mampu menciptakan kondisi sosial politik yang sehat menuju tercapainya tujuan pembangunan bangsa.

Dari segi lain perlu dicatat, bahwa peranan pemerintah adalah begitu besar dan sangat menentukan. Seyogyanya apabila setiap keputusan yang diambil selalu didasarkan atas dan mencerminkan kemauan politik yang sehat, yang selalu makin mendekatkan pada tercapainya cita-cita dan tujuan nasional.

Sejauh menyangkut sistem pendidikan nasional, umumnya sudah disadari sejak semula bahwa sistem pendidikan kolonial tidak lagi sesuai dan harus segera diganti dengan sistem pendidikan nasional. Peranan kunci bidang pendidikan terhadap nation building merupakan kesadaran umum dari semua negara berkembang. Umumnya mereka mengkritik sistem pendidikan kolonial karena isi pendidikan yang tidak realistis dan ruang lingkupnya yang terbatas, yang tidak memadai bagi kebutuhan pembangunan ekonomi dan perombakan sosial.¹

Namun sejauh ini tampak bahwa kita masih belum sepenuhnya berhasil dalam menangani bidang ini, baik dari segi konsepsional maupun dari segi pelaksanaannya.

Dari segi konsepsional kita masih dalam taraf memproses suatu pembauran sistem pendidikan nasional, yang sekaligus diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah umum yang masih kita hadapi di bidang pendidikan, yaitu masalah kuantitatif dan kualitatif, masalah relevansi, efisiensi dan efektivitas.²

Kemajuan-kemajuan tertentu baik dari segi konsepsional maupun dari segi pelaksanaan pendidikan bukannya tidak ada, tetapi apa yang telah dicapai itu masih belum memadai dan masih harus ditingkatkan. Proses demokratisasi dunia pendidikan sudah berjalan sejak kita memperoleh kemerdekaan kembali, jumlah murid dan mahasiswa menjadi berlipat ganda selama lebih dari 30 tahun merdeka, juga jumlah dan jenis lembaga-lembaga pendidikan sudah jauh berkembang. Namun tanpa adanya sistem pendidikan nasional yang terencana baik kita akan tetap ketinggalan. Secara kualitatif kita tidak akan

1 Lihat antara lain: Paul E. Sigmund (Ed.), *The Ideologies of the Developing Nations*, Frederick A. Praeger, 1967, p. 9

2 Lihat: *Laporan Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1980, hal. 13

cukup mampu mengejar ketinggalan kemajuan-kemajuan di bidang ilmu dan teknologi, secara kuantitatif kita akan sulit menampung permintaan yang terus meningkat akan kesempatan memperoleh pendidikan sebagai akibat pertumbuhan penduduk dan makin meningkatnya kesadaran rakyat akan pentingnya pendidikan.

Dalam hubungannya dengan proses pembauran dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa melalui pendidikan formal kiranya perlu ditekankan perlunya menciptakan "situasi pedagogis" dalam seluruh sistem persekolahan kita, mulai dari sekolah dasar sampai pendidikan tinggi. Baik dalam rangka kegiatan intra-kurikuler maupun ekstra-kurikuler sekolah dengan seluruh lingkungannya harus dapat mendorong generasi muda kita untuk selalu peka terhadap hal-hal yang bersangkutan dengan kesatuan dan persatuan bangsa.

Untuk mencapai situasi yang demikian tentu diperlukan beberapa sarana dan prasarana yang memadai, baik yang fisik maupun yang nonfisik, baik berupa "hardware" maupun "software".

Di muka sudah disinggung secara umum pentingnya peranan "pendidik" dalam proses pendidikan. Dalam kerangka pemikiran ini tentulah secara implisit terdapat tuntutan terhadap para pengelola lembaga-lembaga pendidikan, para guru dan para dosen untuk menjalankan peranan yang aktif dan positif di lingkungan dan bidang masing-masing. Usaha untuk mengeliminasi prasangka di satu pihak dan mengarahkan identifikasi sosial di pihak lain dalam rangka memperlancar proses pembauran melalui proses pendidikan tidak hanya dapat dilakukan melalui bidang-bidang studi yang termasuk dalam kelompok IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), seperti lazimnya pendapat orang, tetapi pada hakikatnya secara langsung maupun tidak dapat pula dilakukan melalui bidang-bidang studi yang lain, bahkan melalui "situasi pedagogis" secara keseluruhan.

Dari segi pengelolaan kiranya perlu disinggung juga masalah kebijaksanaan penerimaan murid/mahasiswa atau kebijaksanaan enrolment. Prinsip tiadanya diskriminasi karena alasan apapun dalam hal ini perlu dikembangkan sebaik-baiknya, pada tempat pertama lebih-lebih pada sekolah-sekolah negeri.

Dalam hubungan ini dalam Laporan Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional (KPPN) terdapat perumusan sebagai berikut: "Dalam penerimaan murid, tidak ada diskriminasi baik atas dasar kesukuan, agama, asal-usul daerah, derajat dan kekayaan maupun atas dasar jenis kelamin. Untuk menjaga agar prinsip ini dapat dilaksanakan, harus disediakan tempat secukupnya guna memenuhi permintaan enrolment serta diusahakan pemerataan kualitas pendidikan."¹

1 *Laporan KPPN*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1980, *Ibid.*, hal. 58

Tidak adanya diskriminasi atas dasar kesukuan tersebut kiranya perlu diartikan secara luas, termasuk pengertian tidak adanya diskriminasi atas dasar *ras*.¹

Ditinjau dari segi masalah pembauran hal ini penting, karena dalam rangka penerimaan murid/mahasiswa baru setiap tahun praktek diskriminasi atas dasar ras itu justru yang lebih menonjol, meskipun hal itu tidak pernah dipersoalkan secara terbuka.

Pemerintah tentu berwenang menentukan sesuatu kebijaksanaan mengenai masalah itu apabila melihat adanya alasan untuk itu, namun yang kiranya perlu mendapatkan perhatian ialah bahwa kebijaksanaan itu tidak sampai merugikan proses pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Kebijaksanaan itu seyogyanya dilakukan secara "terbuka", sehingga masyarakat dapat mengerti dan menerima bahwa kebijaksanaan dimaksud memang perlu dilakukan karena sesuatu pertimbangan yang obyektif dan rasional.

Tindakan pemerintah menutup semua sekolah Cina pada tahun 1967 berdasarkan Keputusan Sidang Presidium Kabinet tanggal 18 Mei 1966 yang kemudian dikukuhkan dengan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 37/U/IN/6/1967, adalah sangat tepat. Keadaan yang merupakan warisan kebijaksanaan politik kolonial pada masa lalu itu jelas tidak dapat dipertahankan karena pengaruhnya yang merugikan ditinjau dari segi integrasi nasional. Namun apabila tindakan tersebut tidak segera diikuti oleh langkah dan kebijaksanaan yang tepat dan memadai pada gilirannya juga akan menimbulkan permasalahan dengan pengaruh-pengaruhnya yang negatif.

Sebagai penutup ingin diketengahkan sekali lagi bahwa proses pembauran yang dalam rangka pembangunan nasional mempunyai arti strategis seperti telah diuraikan, harus digerakkan dari dua jurusan. Di satu pihak diarahkan kepada menghilangkan prasangka dari masyarakat, di lain pihak mengarahkan identifikasi sosial secara positif, menimbulkan dan memupuk kesamaan nilai, sikap hidup dan peri laku sehingga tercipta persatuan dan kesatuan bangsa, senasib seperjuangan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad bersama mencapai cita-cita bangsa.

1 Bandingkan dengan Draft Laporan terakhir KPPN, Dokumen D3.38, Kebijakan Umum Enrolment. Kesukuan ditulis *ras*